

BAB I

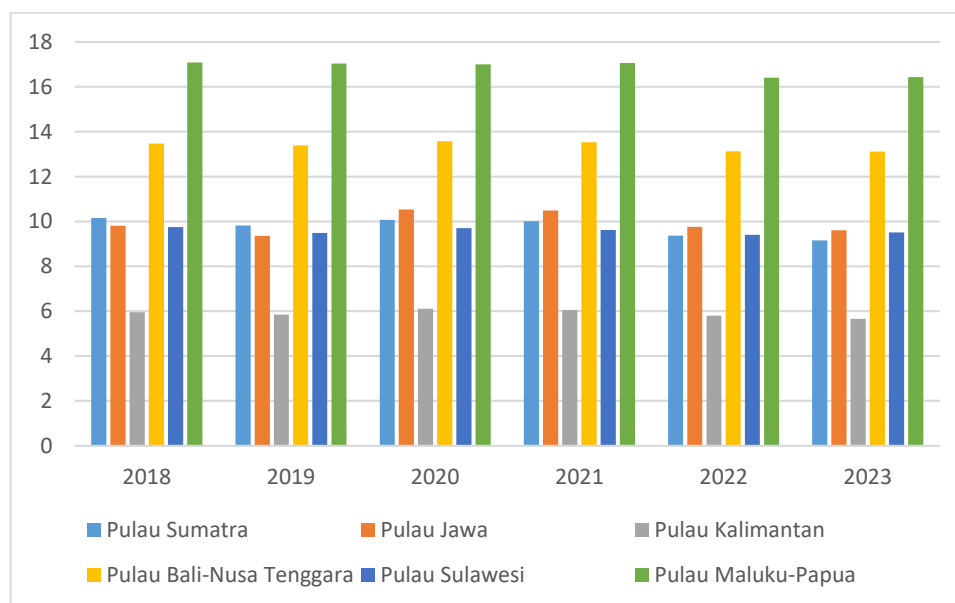
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengentasan kemiskinan menjadi tujuan pembangunan ekonomi. kemiskinan telah membuat masalah yang terus-menerus terjadi di bidang ekonomi, dan telah menjadi faktor utama dalam keberhasilan banyak pemerintah dalam pembangunan nasional. Apalagi khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan dipandang sebagai ketidak-mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan bukan pangan yang ditaksir dari sisi pengeluaran (Putri, 2019). Dalam pembangunan manusia, kemiskinan telah memberikan dampak yang sangat besar. Pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam melakukan daya beli yang sulit dilakukan oleh masyarakat miskin membuat hal tersebut stagnan dalam tiga indikator pembangunan manusia tersebut. Rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, rendahnya produktivitas masyarakat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (Sidabutar et al., 2020).

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti papan, sandang dan pangan. Menurut Chambers (1998) kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan (*proper*); (2) ketidakberdayaan (*powerless*); (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*); (4) ketergantungan (*dependence*); dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Pada umumnya konsep dari kemiskinan itu sendiri selalu dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, kemiskinan dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dimiliki seseorang atau keluarga dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar yang minimum yang biasa digunakan sebagai pembatas antara miskin dan tidak miskin (Arsyad, 2010).

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang sebagian besar wilayahnya memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti hasil pertanian dan perkebunan, namun kekayaan alam yang dimiliki tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakatnya. IPM yang rendah serta tingkat kemiskinan yang tinggi masih menjadi permasalahan utama di Pulau Jawa. Persentase penduduk miskin di antar pulau mengalami fluktuasi selama periode 2018 hingga 2023. Dengan demikian, diperoleh grafik presentase kemiskinan sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Antar Pulau di Indonesia Tahun 2018-2023 (persen)

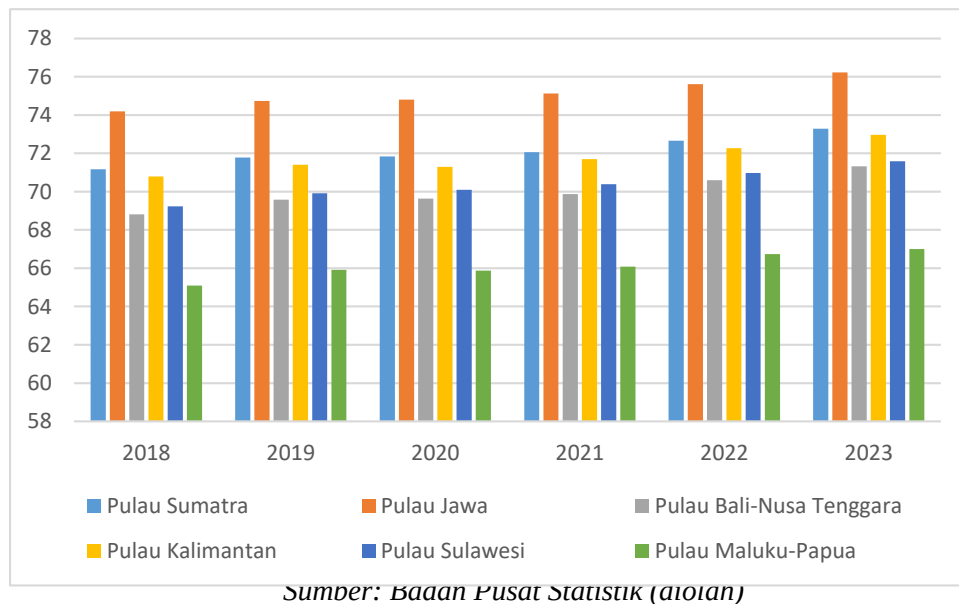
Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Pulau Jawa mengalami fluktuasi selama periode 2018 hingga 2023. Meskipun cenderung menurun dari 9,80% pada tahun 2018 menjadi 9,60% pada tahun 2023, tren ini belum mencerminkan pengentasan kemiskinan yang signifikan jika dibandingkan dengan potensi ekonomi yang ada di wilayah ini. Tingkat kemiskinan yang tinggi ini salah satunya disebabkan kepadatan

populasi penduduk di Pulau Jawa sangat tinggi. Kepadatan penduduk ini memiliki dampak terhadap kualitas hidup masyarakat, diantaranya; persaingan pekerjaan, persaingan pemukiman, meningkatnya angka kriminalitas dan, biaya hidup yang semakin tinggi (Chritiani et al., 2014).

Walaupun Pulau Jawa lebih maju secara ekonomi dibandingkan wilayah lain, masalah kemiskinan tetap ada. Perbedaan tingkat kemiskinan antarprovinsi di Pulau Jawa juga menjadi perhatian, karena beberapa provinsi masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat, yang dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Pulau Jawa, yang menjadi pusat pendidikan dan layanan kesehatan terbaik di Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan IPM secara merata di setiap provinsi. IPM adalah ukuran penting untuk menilai pembangunan manusia di suatu wilayah.

Menurut (BPS) di dalam IPM terdapat 3 bidang dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungan, yakni; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari waktu ke waktu pemerintah telah menjalankan berbagai program dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas SDM salah satunya adalah melalui program pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan merupakan sebuah pionir dalam berkembangnya pembangunan suatu bangsa sehingga menjadi permasalahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika dunia pendidikan belum mampu didapatkan oleh semua lapisan masyarakat, maka pembangunan bangsa tersebut tidak akan berjalan dengan cepat. Karena aktor dari pembangunan itu sendiri adalah masyarakat yang berkualitas sehingga mampu dan bijak dalam mengelola sumber-sumber daya modal/ alam yang ada di wilayahnya. Tujuan dari peningkatan IPM tersebut adalah tentunya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. IPM di

antar pulau mengalami fluktuasi selama periode 2018 hingga 2023. Dengan demikian, diperoleh grafik IPM sebagai berikut:



**Gambar 1.0.2 IPM Antar Pulau di Indonesia Tahun 2018-2023
(persen)**

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2018-2023, IPM di Pulau Jawa terus meningkat dan menjadi yang tertinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Namun, peningkatan ini belum tentu diikuti dengan penurunan kemiskinan yang signifikan, sehingga menunjukkan bahwa banyak faktor yang memengaruhi kemiskinan dan IPM. Faktor-faktor ekonomi seperti TPT dan inflasi seringkali berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan secara positif artinya ketika TPT dan inflasi naik tingkat kemiskinan juga akan meningkat, sementara peningkatan PDRB dan UMR diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan IPM. Menurut Mahsunah (2013) tingginya angka pengangguran secara ekonomi berpotensi mengurangi kesempatan dalam peningkatan produktivitas secara regional, dan sosial mencerminkan semakin besarnya beban bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Tingginya pengangguran akan mendorong masyarakat masuk pada kelompok penduduk miskin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Soemartini (2016) menyatakan bahwa peningkatan pengangguran berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Inflasi yang tak terbandung dapat mengganggu kestabilan perekonomian serta dapat menjadikan nilai mata uang turun sehingga menekan daya beli masyarakat. Artinya, apabila inflasi naik maka akan ikut naik harga barang - barang umum, kondisi ini menjadikan masyarakat sulit memenuhi kebutuhan harian serta membuat masyarakat seolah-olah menjadi lebih miskin. Inflasi bisa menurunkan pendapatan riil khususnya untuk kelompok dengan pendapatan tetap. Selama kondisi inflasi, orang dalam kelompok yang memiliki pendapatan tetap akan kesulitan, sebab naiknya harga beberapa jasa dan barang lebih cepat dari upah nominal. Kelas-kelas miskin pun ikut menderita karena upah mereka tetap tetapi harga komoditas terus naik (Oye, 2012).

Norton (2002) menyatakan bahwa pertumbuhan PDRB yang tinggi dan PDRB per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini kemudian akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, sehingga standar hidup layak masyarakat dapat meningkat atau dengan kata lain angka kemiskinan akan berkurang. Semakin besar PDRB per kapita suatu negara atau daerah, semakin makmur masyarakatnya. Oleh karena itu, PDRB per kapita juga seringkali digunakan untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi antarnegara. PDRB yang selama ini digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu wilayah, tidak secara langsung berkaitan dengan pembangunan manusia. Subjek dari pembangunan itu sendiri adalah sumber daya manusia. Secara teori sederhana, jika manusia tidak memiliki keterampilan

maka ia tidak akan memiliki pendapatan yang menyebabkan daya belinya berkurang sehingga masuk kedalam lingkaran kemiskinan.

Kebijakan upah minimum dinilai meringankan pemerintah karena pemerintah tidak perlu menyiapkan anggaran yang besar untuk membuat kebijakan tersebut. Upah minimum regional umumnya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Upah minimum dianggap mampu mengurangi tingkat kemiskinan jika nilai upah minimum riil nya lebih besar dari tingkat inflasi yang berlaku saat itu dan produktivitas dari para pekerjanya juga tinggi sehingga daya beli riil masyarakat tidak mengalami penurunan. Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan pekerja. Menurut Kuncoro et al (2003) semua ukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen yaitu, (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kebijakan penetapan upah minimum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar hidup minimum masyarakat. Upah minimum diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan upah rendah. Jika efektif, upah minimum dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan karena dapat membantu penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Selain menjadi isu penting dalam pembangunan, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Di satu sisi, tingginya kemiskinan dapat menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya menurunkan IPM. Di sisi lain, rendahnya IPM juga bisa menjadi penyebab utama kemiskinan karena kurangnya kualitas sumber daya manusia untuk bersaing di pasar kerja. Hubungan timbal balik ini menunjukkan adanya masalah endogenitas, yaitu ketika variabel penjelas juga dipengaruhi oleh variabel yang dijelaskan. Jika masalah ini diabaikan

dan tetap menggunakan model regresi biasa seperti Ordinary Least Squares (OLS), maka hasil analisis akan menjadi bias dan tidak akurat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model panel simultan, yang mampu menangani hubungan dua arah antar variabel serta memperhitungkan variasi antar daerah dan waktu (Baltagi, 2021). Model ini dipilih agar hubungan antara kemiskinan dan IPM di Pulau Jawa dapat dianalisis secara lebih tepat dan menyeluruh.

Menurut hasil penelitian Arba et al (2021) aplikasi model persamaan simultan data panel dinamis untuk pemodelan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah, menyebutkan bahwa pada model persamaan IPM variabel-variabel yang signifikan berpengaruh adalah variabel PDRB dan lama bersekolah. Lalu Siregar et al (2023) tentang analisis dampak inflasi terhadap angka kemiskinan di Indonesia, menyebutkan bahwa inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan tetapi pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan IPM, masih terdapat gap dalam pemahaman tentang interaksi antara TPT, inflasi, PDRB, dan UMR secara simultan di Pulau Jawa. Seperti keterbatasan dalam kombinasi variabel dan keterbatasan metodologi penelitian, serta keterbatasan periode data yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis dampak dari keempat variabel tersebut secara bersamaan terhadap kemiskinan dan IPM secara simultan, yang tidak akan terlihat oleh regresi biasa, serta menggunakan data yang terbaru. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi dapat mempengaruhi kemiskinan dan IPM. Sehingga peneliti dapat memberikan judul penelitian yaitu **“Analisis Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa Tahun 2018-2023 (Model Panel Simultan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan, berikut Rumusan masalah yang penulis cantumkan:

1. Bagaimana pengaruh TPT, inflasi, IPM secara parsial terhadap kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh TPT, inflasi, IPM secara bersama-sama terhadap kemiskinan?
3. Bagaimana pengaruh PDRB, UMR, kemiskinan secara parsial terhadap IPM?
4. Bagaimana pengaruh PDRB, UMR, kemiskinan secara bersama-sama terhadap IPM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga Rumusan masalah yang sudah penulis paparkan, maka terdapat tujuan penelitian yang ingin penulisan capai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh TPT, inflasi, IPM secara parsial terhadap kemiskinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh TPT, inflasi, IPM secara bersama-sama terhadap kemiskinan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB, UMR, kemiskinan secara parsial terhadap IPM.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB, UMR, kemiskinan secara bersama-sama terhadap IPM.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik itu kegunaan praktis maupun kegunaan pengembangan ilmu.

1. Kegunaan praktis

Memberikan kajian kemiskinan dan IPM secara komprehensif guna pertimbangan pengambilan kebijakan.

2. Bagi Pengembangan Ilmu

- a. Kegunaan pengembangan ilmu pengetahuan berguna bagi penulis dan juga bagi pembaca. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menggunakan model penelitian panel simultan dengan menggunakan E-Views terhadap topik yang diteliti dan dua variabel devenden dalam satu model. Penggunaan model penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel dependen dan independen saling mempengaruhi secara timbal balik dalam satu periode waktu yang sama. Ini diharapkan dapat membantu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memberikan referensi model penelitian yang baru.
- b. Bagi peneliti selanjutnya merupakan sarana referensi dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan karya tulis ilmiah dengan topik bahasan yang relevan dengan penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan data sekunder yaitu dengan menggali informasi melalui *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Demikian merupakan tabel jadwal penelitian yang telah di buat peneliti sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

[illegible]